
KEDISIPLINAN APARAT DESA DALAM MENINGKATKAN MUTU PELAYANAN**Oleh****Daniati Hi Arsyad****Universitas Madako Tolitoli****Jl. Kampus Umada Nomor. 1 Kelurahan Tambun, Kecamatan Baolan, Kabupaten Tolitoli
(94516)****Email: daniatidani74@gmail.com****Abstrak**

Disiplin aparat kantor desa berarti kesanggupan aparat untuk menaati segala peraturan yang diperintahkan dan menghindari segala larangan yang telah ditentukan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kedisiplinan Aparat di kantor Desa Ogomoli Kecamatan Galang Kabupaten Tolitoli, dengan menggunakan metode penelitian kualitatif. Informan dari penelitian adalah Masyarakat dan Aparat Desa Ogomoli Kecamatan Galang Kabupaten Tolitoli. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan observasi (pengamatan), wawancara dan dokumentasi. Adapun Teori yang digunakan adalah Robbins (2005:182), dimana penelitian ini terdapat tiga indikator sebagai alat ukur yaitu disiplin waktu, disiplin aturan, dan disiplin tanggung jawab. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Aparat tidak tepat waktu datang ke kantor, karena sebagian Aparat datang terlambat tidak sesuai dengan waktu yang sudah ditentukan. Seharusnya Aparat dapat dikatakan disiplin terbentuk dari adanya kesadaran dan kesediaan seseorang dalam menaati semua aturan dan norma yang telah ditetapkan, Aparat di kantor Desa Ogomoli belum menggunakan pakaian yang ditetapkan dalam hal ini belum disiplin dalam berpakaian. Karena belum ada tekanan yang kuat dari kepala Desa selaku pihak yang berwenang. Disiplin merupakan tindakan manajemen untuk mendorong para anggota organisasi memenuhi tuntutan berbagai ketentuan tersebut. Jadi dapat dikatakan bahwa Aparat di kantor Desa Ogomoli sudah menjalankan fungsinya dengan baik. Aparat kantor Desa Ogomoli sudah menggunakan peralatan kantor dengan hati-hati karena dapat dilihat dari tindakan yang dilakukan Aparat dengan bersikap tanggung jawab atas pekerjaan yang telah dilakukan. Aparat Desa Ogomoli sangat bertanggung jawab sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Kata Kunci : Aparat Desa & Kedisiplinan**PENDAHULUAN**

Pendidikan merupakan kegiatan yang sangat kompleks. Hampir seluruh dimensi kehidupan manusia terlibat dalam proses pendidikan, baik secara langsung maupun tidak langsung. Dalam proses pendidikan, ada berbagai unsur lainnya. Bagaimanapun penanganan pendidikan harus mempertimbangkan dimensi agar strategis dan kebijakan yang ditempuh benar-benar mengantarkan Indonesia pada tujuan yang dicita-citakan.

Begitu pentingnya pendidikan bagi setiap manusia. Maka kebutuhan dari pendidikan akan pendidikan bermutu selain

harapan semua orang, juga merupakan sarana utama untuk menghasilkan sumber daya yang mampu memaksimalkan potensi diri yang dimiliki serta mampu mengelola sumber daya yang berkualitas, sehingga mampu menghadapi perkembangan zaman yang hampir selalu berubah.

Pendidikan memiliki fungsi yang hakiki dalam mempersiapkan sumber daya manusia yang akan menjadi aktor-aktor dalam menjalankan fungsi dalam berbagai bidang kehidupan, seperti bidang kependudukan, politik, ekonomi, ketenaga kerjaan, dan sosial budaya. Hubungan antara pendidikan dan bidang-bidang kehidupan diluar pendidikan,

perlu dibahas agar terjadi sinergi antara sistem internal pendidikan dan faktor eksternal tersebut. Tantangan eksternal dari sistem pendidikan seharusnya merupakan sumber inspirasi yang paling utama dalam melakukan perubahan dan pembaruan sistem pendidikan itu sendiri secara internal. Dengan melakukan kajian terhadap keadaan dan permasalahan mengenai bidang-bidang kehidupan lain di luar pendidikan, beberapa permasalahan dan tantangan dalam pembangunan sistem pendidikan akan muncul kepermukaan.

Tantangan masa depan bagi sistem pendidikan di Indonesia tidak semata-mata menyangkut bagaimana meningkatkan pendidikan secara internal, tetapi juga bagaimana meningkatkan kesesuaian pendidikan dengan bidang-bidang kehidupan lain. Kebijakan pendidikan merupakan suatu hal yang pokok untuk menentukan arah dan pedoman dalam penyelenggaraan pendidikan dalam suatu negara. Dalam penyelenggaraan pendidikan disetiap lembaga pendidikan tidak akan pernah lepas dari suatu kebijakan yang dibuat oleh pemerintah dalam negara tempat lembaga pendidikan yang ada.

Analisis kebijakan pendidikan sangat terkait dengan persoalan nilai, moral dan etika, karena rekomendasi analisis kebijakan menuntun kita menentukan berbagai alternatif yang bernilai lebih. Di Indonesia merupakan negara hukum yang menitik beratkan sektor pendidikan sebagai wahana untuk memajukan negara. Kebijakan demi kebijakan dibongkar pasang untuk menghasilkan kualitas pendidikan yang optimal, meski realitanya masih jauh dari harapan.

Tuntutan paling mendesak dalam memacu pembangunan pendidikan yang bermutu dan relevan ialah peningkatan kemampuan dalam melakukan analisis kebijakan. Para analisis kebijakan dalam pendidikan tidak hanya dituntut untuk menguasai isu-isu pendidikan yang relevan baik isu pendidikan secara internal maupun isu-isu pendidikan dalam kaitannya secara lintas sektoral.

Kebijakan pendidikan merupakan suatu hal yang pokok untuk menentukan arah dan pedoman dalam penyelenggaraan pendidikan dalam suatu negara. Dalam penyelenggaraan pendidikan disetiap lembaga pendidikan tidak akan pernah lepas dari suatu kebijakan yang dibuat oleh pemerintah dalam negara tempat lembaga pendidikan yang ada. Analisis kebijakan pendidikan sangat terkait dengan persoalan nilai, moral dan etika. Karena rekomendasi analisis kebijakan menuntun kita menentukan berbagai alternatif yang bernilai lebih.

Di Indonesia merupakan negara hukum yang menitik beratkan sektor pendidikan sebagai wahana untuk memajukan negara. Kebijakan demi kebijakan dibongkar pasang untuk menghasilkan kualitas pendidikan yang optimal, meski realitanya masih jauh dari harapan.

Tuntutan paling mendesak dalam memacu pembangunan pendidikan yang bermutu dan relevan ialah peningkatan kemampuan dalam melakukan analisis kebijakan. Para analisis kebijakan dalam pendidikan tidak hanya dituntut untuk menguasai isu-isu pendidikan yang relevan baik isu pendidikan secara internal maupun isu-isu pendidikan dalam kaitannya secara lintas sektoral.

LANDASAN TEORI

Suatu modifikasi penerapan kedisiplinan kerja Aparat dapat dipandang suatu modifikasi perilaku untuk Aparat, salah satu contoh masalah aparat yang tidak produktif. Disiplin adalah disiplin diri, karena sebagian besar orang memahami apa yang diharapkan dari dirinya dalam suatu pekerjaan dan biasanya Aparat diberi kepercayaan untuk menjalankan pekerjaannya secara efektif. Pengukuran disiplin kerja dapat dilihat dalam teorinya **Robbins** (2005:182) yang mengatakan bahwa disiplin kerja dapat diukur dari tiga aspek yaitu:

1. Disiplin waktu, yaitu menaati ketentuan jam kerja yaitu datang dan pulang jam kerja

2. Disiplin aturan, yaitu memakai pakaian model, warna dan atribut yang telah ditentukan dan mengikuti cara kerja yang ditentukan oleh organisasi.
3. Disiplin tanggung jawab, yaitu selalu tepat waktu dalam melakukan hal apapun yang kita perbuat dan berani menerima resiko yang kita perbuat dan dijalani dengan sungguh-sungguh.

Sedangkan sikap disiplin tersebut dapat tercermin dalam pola tingkah laku seperti apa yang diungkapkan oleh **Sinungan Muchdarsyah** (2009: 145-146). dengan ciri-ciri sebagai berikut:

1. Adanya hasrat yang kuat untuk melaksanakan sepenuhnya apa yang sudah menjadi norma, etik dan kaidah yang berlaku dalam masyarakat;
2. Adanya perilaku yang dikendalikan;
3. Adanya ketaatan.

Dari ciri-ciri pola tingkah laku pribadi disiplin tersebut, jelaslah bahwa disiplin membutuhkan pengorbanan baik itu perasaan, waktu, kenikmatan dan lain sebagainya, dengan tujuan untuk melatih dan mendidik seseorang mengontrol dirinya serta membantu seseorang untuk mengetahui perilaku yang salah agar kemudia dapat dijadikan sebagai bahan evaluasi dan dimengerti apa saja yang seharusnya perlu ditetapkan.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini adalah deskriptif kualitatif yaitu dengan studi yang mengkaji kedisiplin Aparat di Kantor Desa. Pemilihan metode kualitatif yaitu ditujukan untuk memahami fenomena sosial yang terjadi melalui sudut pandang melalui partisipan atau dapat dikatakan untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah (Burhan Bungin, 2007:67). Dalam penelitian ini peneliti merupakan instrument yang dibantu dengan pedoman wawancara dan alat perekam serta alat tulis menulis lainnya.

Bentuk data utama yang diperoleh dalam penelitian ini yakni data kualitatif berupa wawancara pada 7 orang informan yang telah ditentukan oleh peneliti. Data sekunder dalam

penelitian ini adalah data pendukung yang bersumber dari obyek penelitian, buku (kepuustakaan), atau pihak-pihak lain yang memberikan data yang erat kaitan dengan objek dan tujuan penelitian yang berasal dari dokumen, buku-buku, internet dan jurnal. Data sekunder itu data yang diperlukan guna untuk melengkapi data dalam penelitian ini, dan digunakan untuk menganalisa yang berkaitan dengan Disiplin Aparatur Desa.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kebijakan (*Policy*) sering kali diidentikan dengan politik, aturan, program, undang-undang keputusan, peraturan, konvensi, ketentuan, kesepakatan dan beberapa rencana strategis lainnya. Aneka pandangan tentang istilah kebijakan *Stephen J Ball* mengatakan *policy as text discourse* yang menarik untuk dielaborasi. Seperti penggunaan istilah diberbagai negara di Inggris, *Policy* berarti kebijakan ; Latin *politia*, berarti politik ; Yunani *polis* berarti negara, *sankrit*, *pur* berarti kota. Definisi dalam Tim revisi kamus Besar Bahasa Indonesia, kebijakan dimaknai sebagai kepandaian, kemahiran, kebijaksanaan juga dipandang sebagai rangkaian konsep dan asa yang menjadi dasar rencana dalam pelaksanaan pekerjaan, cara kepemimpinan atau cara bertindak pemerintah, organisasi atau pernyataan cita-cita, tujuan, prinsip, sebagai garis pedoman dalam mencapai sasaran. Kebijakan merupakan aturan tertulis dari sebuah organisasi, misalnya ; kebijakan didefinisikan sebagai ; 1). Undang-undang. 2). Peraturan Pemerintah. 3).Keputusan Presiden. 4).Keputusan Menteri. 5).Peraturan Daerah. 6). Keputusan bupati. 7). Keputusan direktur atau hal lainnya.

Dokumen kebijakan ini sifatnya mengikat, wajib dilaksanakan oleh sasaran kebijakan. Hal ini jelas kebijakan merupakan keputusan pemerintah bersifat umum, berlaku untuk seluruh anggota masyarakat. Kebijakan berbeda dengan keputusan karena kebijakan merupakan rangkain tindakan yang memiliki tujuan tertentu diikiuti dan dilaksanakan oleh pelaku atau sekelompok pelaku lainnya guna

memcahkan suatu masalah yang menjadi perhatian banyak pihak.

Kebijakan menjadi bagian dari perencanaan guna mempersiapkan seperangkat keputusan yang berupa biaya, personil, jadwal untuk mencapai tujuan, yang dilakukan sejumlah aktor terdiri dari pemimpin, bawahan, lembaga pemerinth atau swasta dalam suatu bidang atau kegiatan tertentu. Maskuri mengtakan kebijakan adalah sebuah prinsip atau yang digunakan untuk dipilih dalam pross pengambilan suatau keputusan. Cara bertindak secara konsisten dan terencana focus mencapai tujuan.

Dari berbagai pemahaman para pakar tentang kebijakan pendidikan bisa disimpulkan bahwa konsepsi kebijakan sebagai ketentuan atau atran tertulis hasil keputusan dari sebuah lembaga atau organisasi yang sifatnya mengikat, mengatur perilaku orang guna mencapai tujuan, menciptakan tata nilai baru dalam institusi atau organisasi. Analisis kebijakan dipandang sebagai prosedur berfikir manusia yang sudah lama ada, sejak manusia mampu melahirkan pengetahuan dalam konteks tindakan yang mereka ambil sebagai pilihan. Beberapa *expert* lainnya memberikan pemahaman analisis kebijakan sebagai kajian dari ilmu sosial terapan yang tertumpu pada argumentasi rasioanal, fakta dan untuk menjelaskan, menilai dan menghasilkan pemikiran terbaik untuk memecahkan masalah.

Analisis kebijakan sebagai *the use of reason and evidence* berguna untuk *choose the best policy among a number of alternatifes* atau menekankan pada instrumen pemilihan kebijakan yaitu penalaran dan bukti bukti. Proses kajian analisis kebijakan itu multidisipliner yang dirancang secara kreatif, dengan penilaian kritis dan mengkomunikasikan pada hal yang bermanfaat dan dipahami kebijakan itu. Analisis kebijakan sebagai tindakan penting untuk dibuatnya sebagai sebuah kebijakan, baik baru atau kebijakan sebagai konsekuensi dari kebijakan yang sudah ada sebelumnya. Analisis dilakukan dengan telaah kritis terhadap isu tertentu,

melalui analisis pihak yang dipengaruhi kebijakan dengan menggunakan ragam pendekatan, metode, guna mendapatkan nasehat (rekomendasi) kebijakan guna mencari solusi yang tepat dari berbagai masalah yang relevan.

Analisis kebijakan pendidikan adalah prosedur yang menghasilkan informasi kependidikan, memakai data sebagai salah satu masukan bagi perumusan beberapa alternatif kebijakan dalam pengambilan keputusan yang bersifat politis dalam rangka memecahkan masalah kependidikan. Tentu analisis kebijakan pendidikan ini tidak saja menganalisis data dan informasi pendidikan, namun juga harus memperhatikan segala aspek yang terkait dalam proses pembuatan kebijakan. Mulai dari menganalisis masalah, pengumpulan informasi, penentuan alternatif sampai pada penyampaian. Sedangkan rumusan alternatif kebijakan pendidikan tidak dengan sendirinya atau secara langsung dijadikan sebuah kebijakan, jika rumusan kebijakan sudah didukung kekuatan otoritas atau kewenangan yang ada, maka alternatif kebijakan bisa berubah menjadi kebijakan pendidikan. Jadi Prosedur menghasilkan alternatif kebijakan merupakan proses yang rasional.

Selain itu bisa dipahami bahwa banyak pihak menganggap bahwa pendidikan harus membebaskan diri dari politik. Namun tidak ada satupun kebijakan pendidikan yang bersifat strategis yang tidak terkait dengan politik. Seperti ; tujuan nilai nilai, arah dan anggaran pendidikan. Semuanya adalah kesepakatan politik yang terkait dengan pendidikan Nasional. Jadi upaya kanalisasi prosesnya rasional dan politik, pengambilan kebijakan pendiidkan kurang menggambarkan keadaan real (sesungguhnya) dilapangan. Realitasnya banyak ditemui proses rasional analisis kebijakan pendidikan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari proses poliitik. Proses rasional empiris analisi kebijakan pendidikan sering kali dipakai dasar dalam perjuangan politik, tapi sebaliknya proses politik menjadi salah satu bentuk proses rasional sebab proses

politik berorientasi pada kepentingan masyarakat.

Dengan ini kita bisa mendefinisikan analisis kebijakan pendidikan sebagai ilmu sosial terapan sistematis disusun dalam rangka mengetahui substansi kebijakan pendidikan, supaya dipahami secara jelas masalah yang akan dijawab oleh kebijakan dan masalah yang berpeluang timbul sebagai akibat implementasi kebijakan pendidikan itu sendiri. Oleh sebab itu analisis kebijakan dalam bidang pendidikan menjadi hal yang sangat penting dalam era demokrasi termasuk era revolusi industri 4.0, artinya pemerintah atau pihak-pihak yang memiliki kewenangan tidak dibiarkan melakukan tindakan tertentu yang mempengaruhi masyarakat tanpa dipelajari dan dikaji substansi, alasan dan akibat yang akan ditimbulkan dimasyarakat. Disamping itu penting bagi pembuat kebijakan guna memperbaiki atau mempertahankan kebijakan untuk kemaslahatan masyarakat banyak atau kepentingan umum dalam dunia pendidikan itu sendiri.

Analisis Kebijakan Pendidikan menjadi penting dalam menentukan arah dan pedoman penyelenggaraan pendidikan suatu negara. Dalam penyelenggaraan pendidikan tidak mungkin lepas dari kebijakan yang dibuat pemerintah atau pihak yang memiliki kewenangan ditempat lembaga pendidikan itu ada (pendidikan lembaga negeri dan swasta). Analisis kebijakan pendidikan amat penting dalam mencerdaskan kehidupan masyarakat berbangsa dan bernegara. Karena pendidikan sebagai satu bagian dari dimensi kehidupan manusia baik dalam sosial maupun individual. Analisis kebijakan pendidikan perlu didasarkan pada suatu prinsip objektif, tidak hanya untuk menyalahkan kebijakan pemerintah yang sedang berkuasa, atau pihak lain sebagai penyelenggara pendidikan.

Indonesia sebagai negara hukum menitikberatkan pendidikan sebagai wahana memajukan negara. Realitas kebijakan seperti bongkar pasang dengan dalil untuk menghasilkan kualitas pendidikan yang optimal. Namun kenyataannya masih jauh dari yang

diharapkan. Tuntutan paling mendesak dalam meningkatkan mutu pendidikan dan relevan dengan dunia kerja yang semakin kompetitif adalah peningkatan kemampuan para pemangku kepentingan dalam melakukan analisis kebijakan pendidikan. Sebagai pengambil keputusan tidak cukup hanya dengan kemampuan mengetahui dan menguasai berbagai isu dan masalah pendidikan yang relevan baik secara internal, eksternal maupun lintas sektoral.

Para analisis kebijakan pendidikan dituntut untuk menguasai teknik penelitian dan pengembangan kebijakan pendidikan. Isu dan masalah pendidikan secara internal meliputi sistem pendidikan, komponen integral yakni, pendidikan dasar memiliki fungsi dalam menanamkan kemampuan dasar peserta didik, pendidikan berkaitan dengan ilmu pengetahuan dan teknologi, tuntutan kerja dengan pendidikan profesional, termasuk pendidikan non formal, serta komponen penunjang sistem pendidikan.

Isu masalah pendidikan eksternal, terkait dengan integrasi komponen pendidikan dengan kehidupan publik dalam berbagai aspek, antara lain: Dinamika politik, situasi ekonomi, pertumbuhan ketenagakerjaan, kondisi lingkungan hidup, serta gejala kehidupan sosial dan budaya masyarakat. Analisis kebijakan pendidikan perlu mencurahkan sebagian besar perhatiannya untuk memenuhi tantangan dan peluang yang ada. Kemampuan melaksanakan kebijakan analisis pendidikan tidak hanya dituntut menghasilkan gagasan pembaharuan pendidikan berdasarkan isu dan dinamika yang realistik, sesuai dengan perkembangan zaman, sekaligus perlu kemampuan mengkomunikasikan gagasan, ide dan sosial yang dihasilkan, agar bisa terwujud dalam bentuk kebijakan pemerintah atau pihak penyelenggara pendidikan dapat mengelola pendidikan sesuai harapan publik.

Analisis kebijakan pendidikan penting dalam kehidupan masyarakat berbangsa dan bernegara, guna membantu menentukan pilihan tepat atas suatu tindakan yang akan

berpengaruh pada kehidupan masyarakat itu sendiri, khususnya dalam aspek pendidikan. *Policy analysis is the use of reason and evidence to make the best policy choice*, artinya dalam melakukan analisis kebijakan seorang analis perlu berhati-hati dalam mengamati situasi masalah yang akan dijadikan objek kebijakan agar terhindar dari kesalahan pemilihan alternatif kebijakan yang keliru.

Faktor penentu dalam terlaksanakannya kebijakan pendidikan yakni dalam perubahan, pengembangan atau restrukturisasi organisasi pendidikan itu sendiri. Format kebijakan pendidikan ini biasanya dituliskan untuk pimpinan dan personel organisasi pendidikan dalam berinteraksi dengan lingkungan. Analisis kebijakan pendidikan selalu mengarahkan kegiatan pendidik sebagai penyelenggara untuk mencapai tujuan yang telah direncanakan.

Pedoman untuk bertindak bagi pengambil keputusan dari analisis kebijakan pendidikan yang dilaksanakan berfungsi: 1) mencapai ketertiban layanan pendidikan, 2) menjamin hak asasi setiap warga mendapatkan layanan pendidikan, 3) program kegiatan layanan pendidikan berjalan efektif, 4) aktor pendidikan dapat melaksanakan pendidikan, 5) tertib administrasi bisa diwujudkan. Sedangkan fungsi lain dari analisis kebijakan pendidikan, antara lain; 1) Memberikan petunjuk, rambu dan signal penting dalam menyusun program kegiatan. 2) Memberikan informasi mengenai bagaimana strategi akan di laksanakan. 3) Memberikan arahan kepada pelaksana. 4) Untuk kelancaran dan keterpaduan upaya mencapai visi misi sasaran dan tujuan. 5)Menyelenggarakan pengelolaan urusan tata usaha.

PENUTUP

Kesimpulan

Analisis kebijakan pendidikan adalah prosedur yang menghasilkan informasi kependidikan, memakai data sebagai salah satu masukan bagi perumusan beberapa alternatif kebijakan dalam pengambilan keputusan yang bersifat politis dalam rangka memecahkan

masalah kependidikan. Tentu analisis kebijakan pendidikan ini tidak saja menganalisis data dan informasi pendidikan, namun juga harus memperhatikan segala aspek yang terkait dalam proses pembuatan kebijakan. Mulai dari menganalisis masalah, pengumpulan informasi, penentuan alternatif sampai pada penyampaian. Sedangkan rumusan alternatif kebijakan pendidikan tidak dengan sendirinya atau secara langsung dijadikan sebuah kebijakan, jika rumusan kebijakan sudah didukung kekuatan otoritas atau kewenangan yang ada, maka alternatif kebijakan bisa berubah menjadi kebijakan pendidikan.

Indonesia sebagai negara hukum menitikberatkan pendidikan sebagai wahana memajukan negara. Realitas kebijakan seperti bongkar pasang dengan dalil untuk mengasilkan kualitas pendidikan yang optimal. Namun kenyataannya masih jauh dari yang diharapkan. Tuntutan paling mendesak dalam meningkatkan mutu pendidikan dan relevan dengan dunia kerja yang semakin kompetitif adalah peningkatan kemampuan para pemangku kepentingan dalam melakukan analisis kebijakan pendidikan

Fungsi dari analisis kebijakan pendidikan yaitu, Memberikan petunjuk, rambu dan signal penting dalam menyusun program kegiatan. Memberikan informasi mengenai bagaimana strategi akan di laksanakan. Memberikan arahan kepada pelaksana. Untuk kelancaran dan keterpaduan upaya mencapai visi misi sasaran dan tujuan. Menyelenggarakan pengelolaan urusan tata usaha.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] Dunn, William N. 2004. *Pengantar Analisis Kebijakan Publik Edisi kedua*. Gajah Mada: Universitas press.
- [2] Hasbullah. 2015. *Kebijakan Pendidikan Dalam Perspektif : Teori dan Kondisi Obyektif Pendidikan di Indonesia*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- [3] Imron Ali. 1996. *Kebijakan Pendidikan di Indonesia*. Yogyakarta : Bumi Aksara.

-
- [4] Muhadjir N. 2000. *Ilmu Pendidikan dan Perubahan Sosial*. Yogyakarta : Rake Sarasin.
- [5] Nanag, Fattah. 2013. *Analisi Kebijakan Pendidikan*. Bandung : Remaja Rosdakarya.
- [6] Rohman, Arif . 2012. *Kebijakan Pendidikan : Analisis Dinamika Formulasi dan Implementasi*. Yogyakarta: Aswaja Presindo.
- [7] Hanisy, A. 2013. *Konsep Dasar Analisi Kebijakan*. Al Qodiri : *Jurnal Pendidikan, Sosial dan Keagamaan*. Vol 4 (1), hal.48 – 63.
- [8] Maskuri. 2017. *Kebijakan Pendidikan Sebagai Kebijakan Publik Dalam Sistem Politik di Indonesia*. *Jurnal Pendidikan Islam Indonesia (JPPI)* Universitas Ibrahimy, Situbondo. Vol. 2 No 1 Hal; 79

HALAMAN INI SENGAJA DIKOSONGKAN